BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memerlukan waktu yang lama. Awalnya, dengan berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri. Hal ini tentu saja menjadikan daerah provinsi, kabupaten, dan kota menjadi entitas-entitas otonom yang harus melakukan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangannya sendiri mendorong perlunya standar pelaporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam pasal 35 mengamanatkan bahwa “penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah”, meskipun belum ada standar akuntansi pemerintahan yang baku.

Belum adanya standar akuntansi pemerintahan yang baku memicu perdebatan siapa yang berwenang menyusun standar akuntansi keuangan

pemerintahan. Sementara itu, pelaporan dan penyajian keuangan harus tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundangan meskipun standar belum ada. Untuk mengisi kekosongan sambil menunggu penetapan yang berwenang menyusun dan menetapkan standar akuntansi pemerintahan dan terutama upaya untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntable maka pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan mengambil inisiatif untuk membuat pedoman penyajian laporan keuangan. Maka lahirlah sistem akuntansi keuangan daerah dari Departemen Keuangan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.07/2001 tanggal 5 Juni 2001. Dari Departemen Dalam Negeri keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 18 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertangungjawaban dan Pengawasan Keuangan Derah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedua keputusan ini bukanlah standar akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 maupun standar akuntansi pada umumnya.

Setelah pemerintah menyusun strandar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik pada pemerintah pusat ataupun pada pemerintah daerah dengan dibentuknya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) pada tanggal 13 Juni 2005 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada SAP tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari : a). Laporan Realisasi Anggaran, b). Neraca, c). Laporan Arus Kas dan d). Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini diharapkan oleh Pemerintah untuk dapat menurunkan tingkat penyimpangan dan bias anggaran yang tidak perlukan, serta akan diadanya transparansi laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan di setiap daerah yang ada, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya tindak korupsi yang merugikan masyarakat.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka suatu Pemerintah daerah diwajibkan untuk melaporkan perencanaan dan penggunaan anggaran di daerahnya setiap satu tahun sekali dan dilaporkan kepada DPRD, masyarakat, dan stakeholder sebagai lampiran dalam pertanggungjawaban tahunan, laporan ini juga akan dimuat di surat kabat setempat. Pemerintah Daerah juga tidak perlu menunggu SK Depdagri, karena sistem SAP dapat diminta kapan saja kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang berada di bawah Depkeu.

Dengan adanya reformasi keuangan pada wacana diatas Pemerintah Daerah khususnya harus dapat mengelola keuangan dengan baik, serta mampu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintahan Daerah dapat menggunakan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini.

Dari pemikiran diatas, penulis bermaksud membuat laporan Tugas Akhir ini tentang data keuangan khususnya dalam penggunaan anggaran Pemerintahan Daerah di Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang akan diberi judul "**Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah"** dimana studi dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyusunan Laporan keuangan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung apakah telah menyajikan laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

C. Batasan Masalah

1. Penyajian laporan keuangan yang akan diteliti dibatasi pada lingkungan yang terbatas yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Penulis membatasi pembahasan penyajian laporan keuangan untuk tahun anggaran 2011.
3. Pengidentifikasian masalah yang muncul hanya dibatasi pada saat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di Pemerintahan Kota Bandar Lampung dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah daerah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari tugas akhir ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

E. Manfaat Penelitian

Secara Praktis

1. Bagi Penulis

Untuk memperluas cara berpikir secara ilmiah mengenai penyajian laporan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang SAP pada laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

2. Bagi pemerintah daerah

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait pada pemerintah daerah.

3. Bagi pihak – pihak lain

Sebagai suatu bahan tambahan ilmu pengetahuan dan bahan referensi yang bermanfaat bagi penelitian sejenis sehingga dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

Secara teoritis :

Laporan keuangan mempunyai manfaat sebagai alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil- hasil yang telah dicapai oleh perusahaan/instansi yang bersangkutan.

Dalam menganalisa dan menilai posisi keuangan dan potensi atau kemajuan instansi/perusahaan , faktor yang paling utama untuk mendapat perhatian oleh penganalisa adalah :

a. Likuiditas adalah menunjukan kemampuan suatu instansi/perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan instansi/perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih.
b. Solvabilitas adalah menunjukan kemampuan instansi/perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila instansi/perusahaan tersebut dilikuidasikan baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
c. Rentabilitas atau profitability adalah menunjukan kemampuan instansi/perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
d. Stabilitas Usaha adalah menunjukan kemampuan instansi/perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan instansi/perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutangnya dan akhirnya membayar kembali hutang-hutang tersebut tepat pada waktunya.